

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, sehingga kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Destinasi Wisata dan PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 5 Provinsi di Pulau Jawa selama periode 2013 – 2023. Hal ini terjadi karena selama periode 2013 – 2023 5 Provinsi di Pulau Jawa tidak banyak membangun destinasi baru, pemerintah provinsi fokus pada pengembangan destinasi yang sudah ada. PDRB per kapita tinggi yang mengindikasikan daya beli masyarakat dan potensi investasi, tidak menjamin bahwa setiap pengeluaran wisatawan akan sepenuhnya dianggap sebagai pendapatan yang dapat dipajaki oleh pemerintah daerah. Banyak pengeluaran wisatawan mungkin mengalir keluar dari ekonomi lokal seperti, hotel yang dimiliki investor asing, produk impor yang dijual di destinasi wisata. Sedangkan akomodasi wisata dan panjang jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 5 provinsi di Pulau Jawa selama periode tahun 2013 – 2023. Akomodasi wisata, khususnya hotel berbintang, merupakan salah satu sumber PAD yang paling langsung dan terukur dari sektor pariwisata. Pemerintah daerah memiliki kewenangan memungut Pajak Hotel dan Restoran (PHPR), yang merupakan komponen signifikan dari PAD. Pulau Jawa memiliki jaringan jalan yang lebih panjang dan terkoneksi sehingga wisatawan bisa lebih mudah menjangkau berbagai destinasi wisata dalam satu daerah maupun lintas daerah. Mobilitas yang

tinggi ini berpotensi meningkatkan total pengeluaran wisatawan di berbagai titik dalam perjalanan mereka. Setiap pengeluaran ini berpotensi dikenakan pajak daerah seperti, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi destinasi wisata yang kemudian akan diterima pemerintah.

2. Variabel Akomodasi Wisata memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara elastisitas absolut (0,536) dengan arah positif, hal ini dikarenakan perannya yang langsung mempengaruhi pengeluaran wisatawan, lama tinggal, penerimaan pajak, serta berpengaruh ke sektor ekonomi lain. Semakin berkembang sektor akomodasi wisata, semakin besar kontribusinya terhadap PAD, meskipun sifatnya masih inelastis, artinya pengaruhnya positif tapi belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan skala yang besar.

B. Implikasi

1. Kebijakan harus diarahkan untuk menarik lebih banyak investasi di sektor perhotelan berbintang, serta mendorong peningkatan kualitas dan standar layanan akomodasi yang ada, karena hal ini akan meningkatkan daya tarik dan okupansi, yang pada gilirannya meningkatkan basis PHPR. Pemerintah daerah fokus pada efisiensi dan kepatuhan dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHPR). Ini termasuk peningkatan pengawasan, audit reguler, penggunaan teknologi untuk transparansi transaksi (tapping dan box), serta edukasi kepada pelaku usaha. Investasi pada infrastruktur jalan yang baik dan terkoneksi adalah prasyarat fundamental dan pendorong signifikan bagi peningkatan PAD pariwisata. Pemerintah provinsi harus terus

memprioritaskan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jaringan jalan, terutama yang menghubungkan destinasi – destinasi wisata utama dan pendukungnya. Konektivitas jalan yang terintegrasi dapat mendorong pengelolaan destinasi wisata secara efisien, misalnya melalui jalur distribusi logistik yang lebih singkat untuk kebutuhan hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Perencanaan yang matang perlu dilakukan agar pembangunan jalan tidak merusak ekosistem destinasi wisata, melainkan mendukung pariwisata berkelanjutan. Panjang jalan yang optimal bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga strategi menghubungkan potensi wisata dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Pemerintah perlu mendorong standarisasi kualitas layanan dan fasilitas akomodasi, melalui sertifikasi pelatihan, atau penyusunan pedoman yang jelas untuk memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik, sehingga mendorong mereka untuk kembali dan berbelanja lebih banyak.